

**PERAN GeRAK ACEH DALAM MENGAWASI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAULIDAR FITRI
NIM. 200801029

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2025 M/ 1447 H

**PERAN GeRAK ACEH DALAM MENGAWASI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

MAULIDAR FITRI
NIM: 200801029

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

PERAN GeRAK ACEH DALAM MENGAWASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI ACEH

SKRIPSI

Maulidar Fitri
NIM. 200801029

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Agustus 2025
27 Safar 1447 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Reza Idria, S.HI., M.A., PhD.
NIP.198103162011011003

Sekretaris


Lidya, S.IP.
NIP.

Penguji I


Ramzi Murziqin, M. A.A R - R A N I R Y
NIP.198605132019031006

Penguji II


Danil Akbar Tagwadin, PhD.
NIP.198904082023211022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Maulidar Fitri
NIM : 200801029
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 Mei 2001
Alamat : Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah,
Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari, terdapat tuntutan atau bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap pernyataan yang disampaikan sebelumnya, peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2025

Menyatakan,





Maulidar Fitri

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi adalah tantangan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 menunjukkan prioritas nasional dalam mengatasi korupsi. Meskipun upaya konkret telah dilakukan, masih terdapat tantangan seperti resistensi internal dan eksternal serta perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK Aceh) dalam mengawasi implementasi kebijakan anti-korupsi di Provinsi Aceh, yang memiliki konteks sosial, politik, dan sejarah yang unik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak GeRAK Aceh terhadap kebijakan anti-korupsi dan menilai efektivitas pengawasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GeRAK Aceh berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kesimpulannya, GeRAK Aceh memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi di Aceh, namun diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala yang ada.

Kata kunci: *GeRAK Aceh, anti-korupsi, pengawasan kebijakan anti-korupsi.*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala Puji bagi Allah swt, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Proposal ini dapat terselesaikan. Atas segala limpahan Rahmat serta karunianya, shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis wajib memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1). Oleh karena itu, penulis memilih judul skripsi, **“Peran GeRAK Aceh Dalam Mengawasi Implementasi Kebijakan Anti Korupsi Di Aceh”** Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Muhamad Syafei dan Ibunda Ernawati yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
2. Abang saya yaitu Andriady, dan kakak perempuan saya Maulina, Meuthia, dan Putri Ramadhani yang tidak pernah berhenti memberi segala motivasi, doa yang terus di panjatkan, dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi ini dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar.
3. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Ramzi Murziqin, M.A, selaku ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Reza Idria, S,HI,. M.A., ph.D. selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama ini kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang terlalu banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Mazwan, S.pd., M.Si, terimakasih telah membersamai perjalanan menyusun dan mengerjakan skripsi dalam kondisi apapun. Terimakasih untuk tenaga, waktunya dan finansialnya yang telah di berikan untuk kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan dukungan yang senantiasa menguatkan di setiap langkah selama penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya Wahyuni Sutari Hsb, S.ip dan Syarifah Rahmatillah yang selalu meluangkan waktu untuk bersusah senang dari semester 1 hingga proses perkuliahan sampai pada tahapan pembuatan Skripsi ini.
10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri. Maulidar Fitri terimakasih sudah bertahan sampai saat ini, sudah berusaha sekuat ini, sudah berjalan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri sendiri karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha sekuat mungkin untuk bertahan dan tidak menyerah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat Ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 26 Agustus 2025

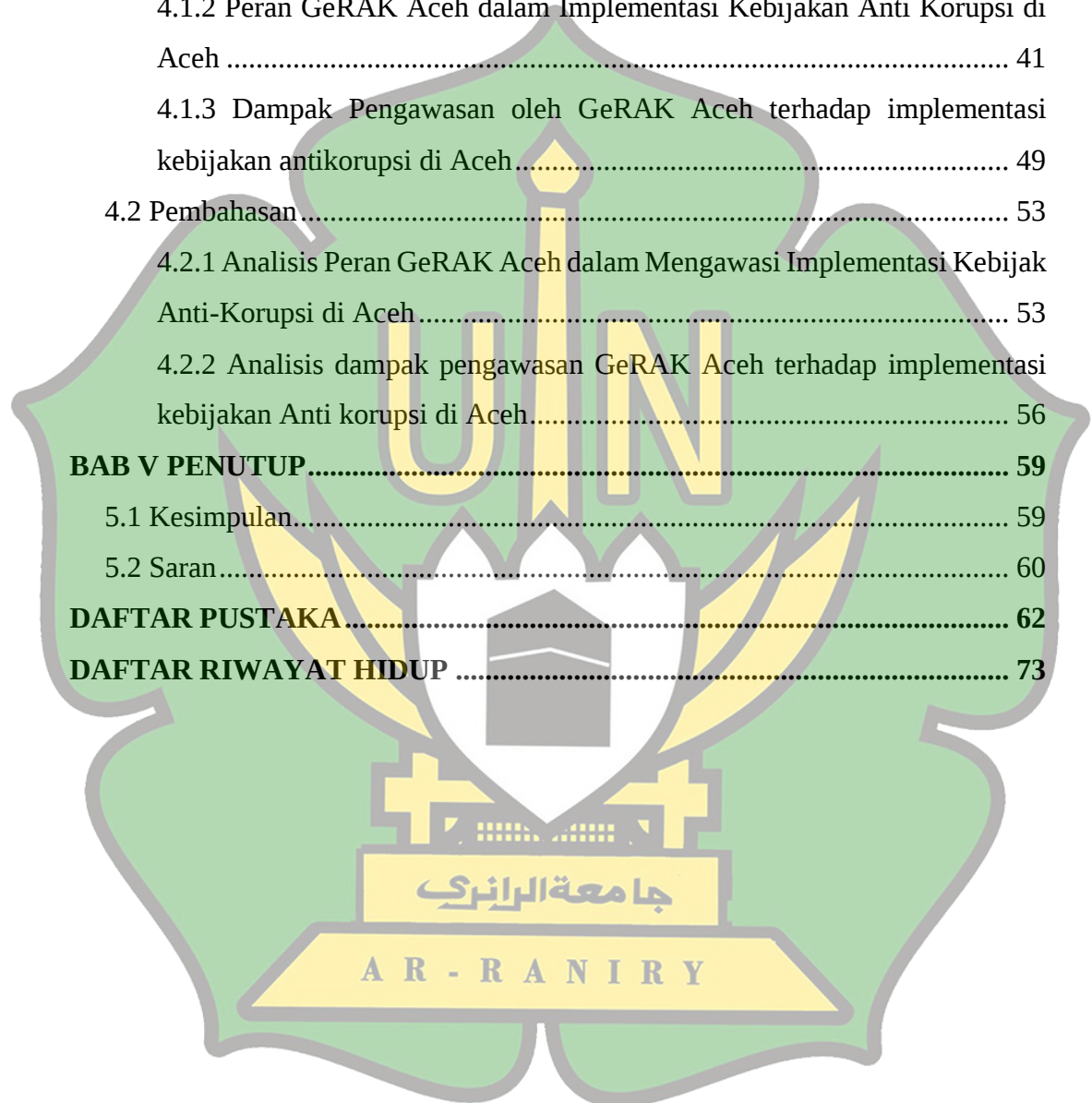
(Maulidar Fitri)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Konseptual	9
2.2.1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	9
2.2.2 Advokasi.....	10
2.2.3 Korupsi	13
2.2.4 Penyebab Korupsi	15
2.2.5 Pengawasan dan Kontrol Sosial	24
2.2.6 <i>Good Governance</i> dan Transparansi	25
2.2.7 Gerakan Sosial dan Advokasi	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.3 Jenis Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Informan Penelitian	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Profil GeRAK Aceh	36
4.1.2 Peran GeRAK Aceh dalam Implementasi Kebijakan Anti Korupsi di Aceh	41
4.1.3 Dampak Pengawasan oleh GeRAK Aceh terhadap implementasi kebijakan antikorupsi di Aceh.....	49
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.1 Analisis Peran GeRAK Aceh dalam Mengawasi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Aceh.....	53
4.2.2 Analisis dampak pengawasan GeRAK Aceh terhadap implementasi kebijakan Anti korupsi di Aceh.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4. 1 Detail sekolah anti-korupsi Aceh.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi GeRAK Aceh.....	37
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian.....	69
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	71
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan persoalan mendasar yang menghambat pembangunan dan melemahkan legitimasi negara. Di Indonesia, agenda pemberantasan korupsi dipertegas dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003. Namun, implementasi kebijakan anti-korupsi masih menghadapi kendala, baik berupa resistensi dari aktor internal dan eksternal, maupun budaya sosial yang permisif terhadap praktik korupsi. Sejalan dengan pandangan Dunn (2003) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan kelembagaan, upaya anti-korupsi di Indonesia sejak reformasi 1998 terus dilakukan melalui regulasi dan program kelembagaan. Provinsi Aceh, dengan karakter sosial-politik yang unik, menjadi salah satu wilayah penting dalam penerapan kebijakan tersebut.¹

Korupsi merupakan persoalan serius yang terus berlangsung di Provinsi Aceh. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik korupsi menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya terlihat pada berbagai sektor, antara lain meningkatnya beban biaya hidup, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta terhambatnya perkembangan ekonomi dan sosial.²

¹ Waluyo, B. *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022.

² Gerak Aceh: *Penerapan MCP Tingkatkan Langkah Pencegahan Korupsi di Aceh*.

Berbagai langkah telah ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, salah satunya melalui penyusunan serta penerapan kebijakan anti-korupsi. Di Aceh, hal ini diwujudkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawasi sekaligus menindak praktik korupsi dan gratifikasi. Kebijakan tersebut dirancang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan akhir memperkuat integritas aparatur serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Peran Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK Aceh) sangat penting dalam mengawal implementasi kebijakan anti-korupsi di Aceh. Sejak berdiri pada tahun 2003, GeRAK Aceh memiliki misi untuk mendorong transparansi, akuntabilitas pemerintahan, serta memperkuat basis gerakan masyarakat sipil di tingkat akar rumput dalam menghadapi praktik korupsi. Lahir dari inisiatif kolektif masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah, dan individu yang memiliki kepedulian, GeRAK Aceh hadir sebagai kekuatan sosial yang berupaya menekan dominasi praktik korupsi oleh aparat pemerintah, pejabat publik, maupun sektor swasta.

Kehadiran GeRAK Aceh tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Aceh yang unik, termasuk pengalaman konflik bersenjata serta bencana tsunami 2004 yang membentuk lanskap sosial-politik daerah ini. Dalam hal ini, peran GeRAK Aceh dapat dipahami sejalan dengan analisis Danil Akbar Taqwadin yang menegaskan bahwa masyarakat sipil di Aceh mengalami transformasi signifikan

dari sekadar aktor perlawanan menjadi aktor yang berperan kritis dalam arena baru, termasuk dalam mengawal kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.³

Dengan perspektif tersebut, kehadiran GeRAK Aceh dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari keterlibatan kritis masyarakat sipil pascakonflik. Gerakan ini bukan hanya simbol resistensi terhadap praktik korupsi, tetapi juga instrumen untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat, memperkuat budaya transparansi, dan meneguhkan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan anti-korupsi di Aceh tidak hanya lahir dari inisiatif negara melalui regulasi, tetapi juga dari dinamika masyarakat sipil yang semakin matang dalam memainkan perannya pada era pasca konflik.

Implementasi kebijakan anti-korupsi tidak hanya melibatkan upaya penegakan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman lebih dalam terhadap persepsi terhadap upaya ini menjadi krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Studi ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana GeRAK Aceh terlibat dalam pengawasan implementasi kebijakan anti-korupsi di Provinsi Aceh.⁴

Tantangan yang dihadapi oleh GeRAK Aceh dalam mengawasi implementasi kebijakan anti-korupsi menjadi salah satu fokus penelitian ini. Analisis mendalam terhadap peran dan dampak GeRAK Aceh akan membantu

³Danil Akbar Taqwadin, "Pergeseran Medan Tempur: Evolusi Masyarakat Sipil dari Perlawanan, Kooptasi, hingga Keterlibatan Kritis di Arena Baru," dalam *Berdamai dari Senjata, Berkonflik dalam UUPA*, ed. Otto Syamsuddin Ishak dkk. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2025).

⁴ Rahayu, P. R, *Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologis* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal), 2020.

mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut serta strategi yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana GeRAK Aceh berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Aceh. Dengan memahami peran, tantangan, dan keberhasilan GeRAK Aceh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga pengawas lainnya. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk meneliti Peran GeRAK Aceh dalam Mengawasi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Aceh, serta dampaknya terhadap kebijakan dan praktik anti-korupsi di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran GeRAK Aceh dalam mengawasi implementasi kebijakan anti-korupsi di Aceh?
2. Apa dampak dari pengawasan GeRAK Aceh terhadap kebijakan anti-korupsi di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran GeRAK Aceh dalam mengawasi implementasi kebijakan anti-korupsi di Aceh.
2. Menganalisis dampak dari pengawasan GeRAK Aceh terhadap kebijakan anti-korupsi di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang peran GeRAK Aceh dalam mendukung pemberantasan korupsi

di tingkat daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lembaga masyarakat sipil terkait untuk meningkatkan upaya anti-korupsi di Aceh.

